



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. LKj Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2025

Plt. INSPEKTUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

IMAM KUSNADI, S.E., M.A.B, CFrA., CRGP., CGCAE.
NIP. 197506092008121001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”:
 - Diukur dengan indikator:
 - a. Nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan di bawah 5%
formulasi penghitungannya adalah dengan:
perbandingan jumlah Total Anggaran APBD Tahun n dengan Total Jumlah Materialitas Temuan seluruh PD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pemeriksaan BPK dan APIP;
 - b. Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP
formulasi penghitungannya adalah dengan:
Skor penilaian oleh tim dari BPKP menggunakan instrumen penilaian yang terdiri dari indikator dan kriteria yang telah ditetapkan. Setiap komponen dinilai berdasarkan level dan menjadi skor/level kapabilitas dan maturitas.
 - Capaian indikator diukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar: 2%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 0,13. Dengan demikian capaian ini mencapai target. Persentase realisasi terhadap target

(capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023, besaran target pada tahun 2024 sama dengan 2023.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektorat”:
- Diukur dengan indikator:
 - a. Hasil penilaian SAKIP Inspektorat Daerah;

formulasi penghitungannya adalah dengan:
Hasil penilaian nilai SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Capaian indikator diukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar: 79; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 80,30. Dengan demikian capaian ini mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023, besaran target pada tahun 2024 lebih besar daripada 2023.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Inspektorat menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapabilitas dari level 3 ke level 4, yang membutuhkan inovasi dan pengawasan berbasis risiko secara menyeluruh;
2. Efektivitas pengawasan terhadap program prioritas daerah perlu ditingkatkan melalui integrasi data dan evaluasi yang lebih komprehensif;

- 
3. Digitalisasi pengawasan juga menjadi tantangan utama akibat keterbatasan infrastruktur teknologi dan keamanan data.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	9
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.3 Isu-isu Strategis	12
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	12
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2024	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2024	26
3.3. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	33

Daftar Tabel

Tabel I.2 Sarana-Prasarana.....	10
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024	12
Tabel II.1 Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023-2026.....	14
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	14
Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	15
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Inspektur	17
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024.....	17
Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja	17
Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024	17
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur	18
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024.....	18
Tabel II.7 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu...19	
Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024	19
Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2024	23
Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	24
Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	25
Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024.....	27
Tabel III.1	29
Program Penyelenggaraan Pengawasan	29
Tabel III.2	30
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.....	30
Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024	31
Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	32

Daftar Gambar

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	3
Gambar I.2.....	2
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Inspektorat Daerah	2
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2
Gambar II.2. <i>Website</i> Inspektorat Daerah	20
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

*Cascading Kinerja, Peta
Proses Bisnis dan Struktur
Organisasi
Tugas, Fungsi dan Peta
Jabatan
Isu-Isu Strategis
Dukungan SDM, Sarana-
Prasarana dan Anggaran
Tindak Lanjut atas
Rekomendasi LHE SAKIP Tahun
2024*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

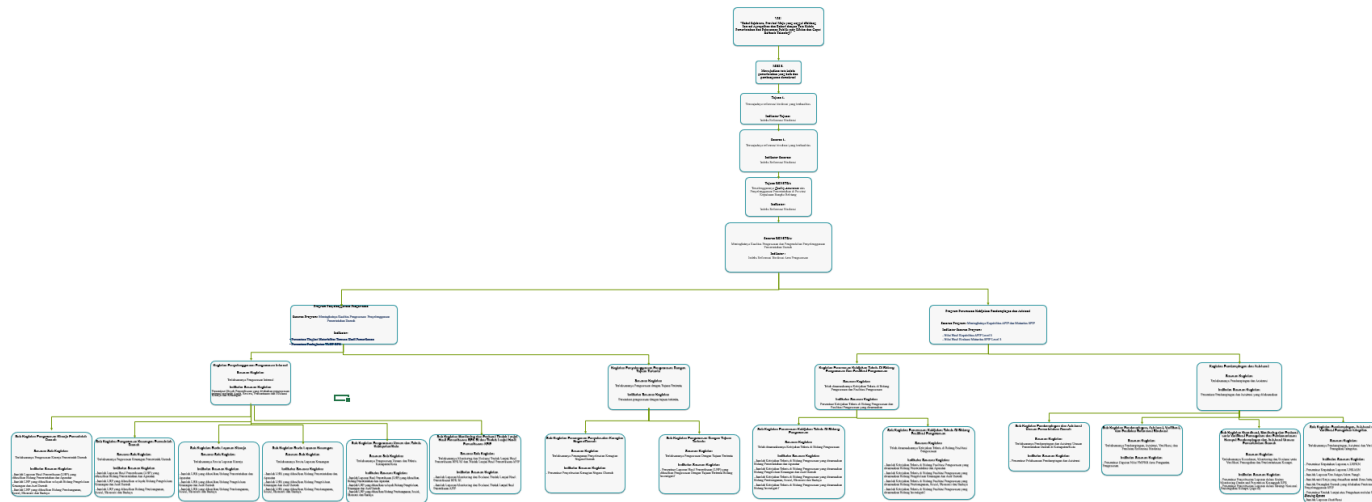
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

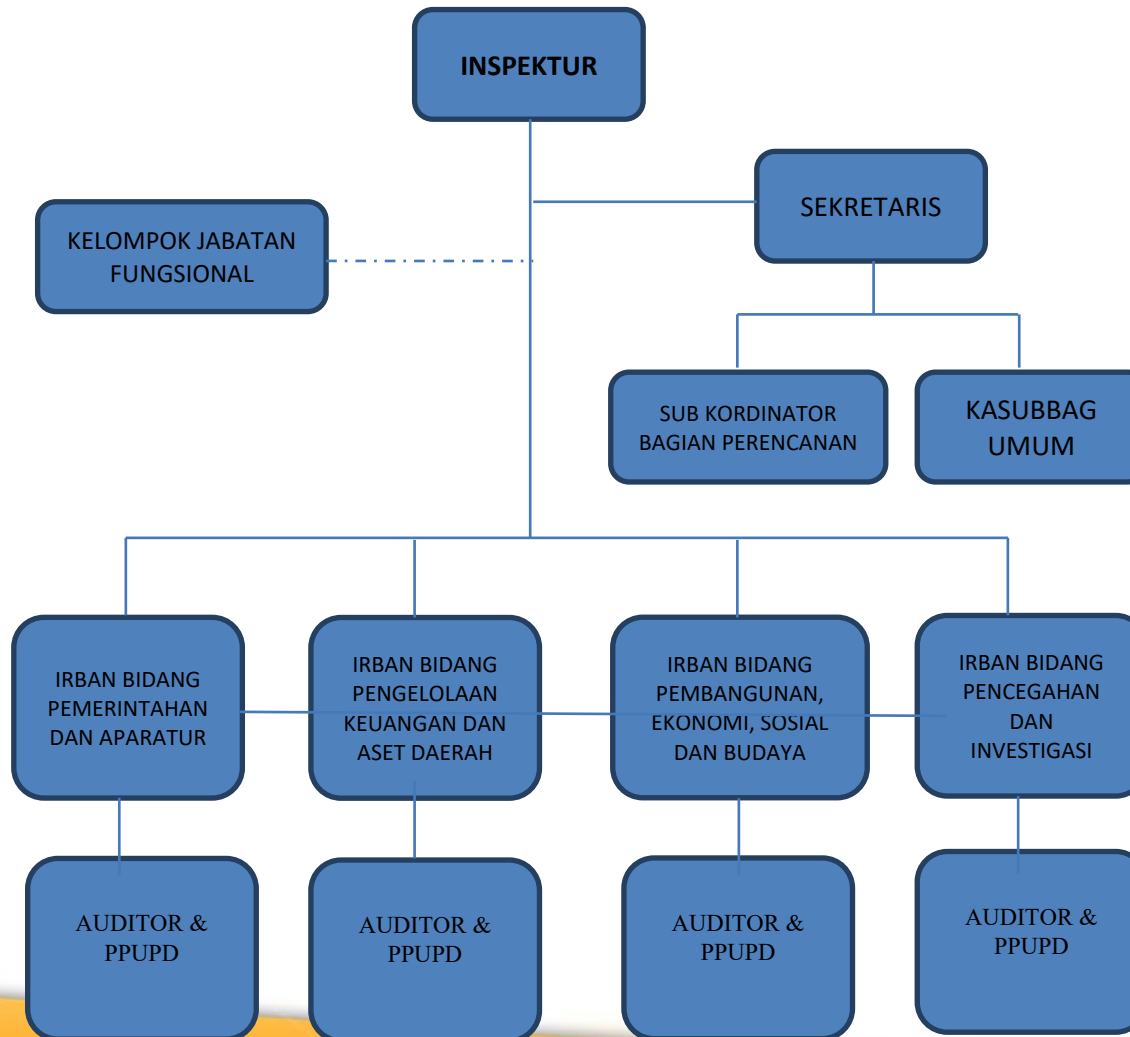


Ket : Cascading lengkap dapat dilihat melalui link : <https://s.id/1xPIF>



Peta Proses Bisnis dapat diakses pada <https://s.id/21Mq9>





1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan. Adapun Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



PETA JABATAN	
Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
Jabatan Struktural: Eselon II: 0 Eselon III: 5 Jabatan Fungsional: Jabatan Fungsional Tertentu: 49	Jabatan Pelaksana: 10

1.3 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif”, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi;
2. Peran evaluasi terhadap hasil pengawasan belum mampu memberikan umpan balik terhadap perbaikan kinerja;
3. Peran pengawasan dalam memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang baik;
4. Potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program prioritas yang memerlukan pengawasan intensif;
5. Tantangan dalam membangun kolaborasi yang efektif untuk menyelaraskan pengawasan dengan tujuan pembangunan daerah.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKUTRAL												
1	Inspektur	1		1			1	1				1	
2	Sekretaris	1		1			1		1				1
3	Irban Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1		1			1	1					1
4	Irban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1		1			1	1				1	
5	Irban Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya	1		1			1	1				1	
6	Irban Bidang Pencegahan dan Investigasi	1		1			1	1				1	
7	Kasubbag Umum	1		1			1	1				1	
B	JABATAN FUNGSIONAL												
1	Perencana Ahli Muda	1		1			1	1				1	
2	Auditor Madya	4		4			4	3	1			2	2
3	Auditor Muda	33		33			33	2	31			15	18
4	Auditor Pertama	5		5			5		5			1	4
5	Auditor Pelaksana Lanjutan	1		1			1			1		1	

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
6	Pengawas Pemerintahan Madya	10		10			10	3	7			5	5
7	Pengawas Pemerintahan Muda	9		9			9					4	5
8	Pengawas Pemerintahan Pertama	1			1		11			1			1
9	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1			1		1			1		1	
C	JABATAN PELAKSANA												
1	Bendahara	1		1			1		1			1	
2	Analisis Tindak Lanjut LHP	2		2			2		2			2	
3	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarpras	2		2			2					1	1
4	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	3			3		3		1	2		3	
5	Pengadministrasi Keuangan	2				2	2				2	1	1
6	Penata Laporan Keuangan	2		2			2		2			2	
7	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1		1			1	1					1
8	Pengadministrasi Umum	1				1	0						
9	Analisis Kepegawaian	1			1		0						
10	Arsiparis	1			1		0						

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
11	Pengelola Program dan Kegiatan	1			1		0						
12	Pengadministrasi perencanaan dan program	1					0						

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 60 (enam puluh) orang (73,17%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 17 (tujuh belas) orang (20,73%), D3 sebanyak 4 (empat) orang (4,89%), dan SLTA sebanyak 1 (satu) orang (1,22%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	Tanah		
	tanah		Rp32.773.358,00
2	Peralatan dan mesin		Rp7.806.563.058,00
	alat besar		Rp340.802.100,00
	alat angkutan		Rp2.646.490.000,00
	alat bengkel dan alat ukur		Rp36.400.000,00
	alat pertanian		-
	alat kantor dan rumah tangga		Rp2.010.224.438,00
	alat studio, komunikasi dan pemancar		Rp131.606.120,00
	alat kedokteran dan kesehatan		-
	alat laboratorium		Rp82.150.000,00
	alat persenjataan		-
	komputer		Rp2.546.460.400,00
	alat eksplorasi		-
	alat pengeboran		-
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian		-
	alat bantu eksplorasi		-
	alat keselamatan kerja		Rp12.430.000,00
	alat peraga		-
	peralatan proses/produksi		-
	rambu – rambu		-
	peralatan olah raga		-
3	Gedung dan bangunan		Rp7.075.253.500,00

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
	bangunan gedung		Rp7.075.253.500,00
	monumen		-
	bangunan menara		-
	tugu titik kontrol/pasti		-
4	Jalan, irigasi dan jaringan		-
	jalan dan jembatan		-
	bangunan air		-
	instalasi		-
	jaringan		-
5	Aset tetap lainnya		Rp48.690.023,00
	bahan perpustakaan		Rp48.690.023,00
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga		-
	hewan		-
	biota perairan		-
	tanaman		-
	barang koleksi non budaya		-
	aset tetap dalam renovasi		-
6	Konstruksi dalam pengerjaan		Rp96.050.000,00
	konstruksi dalam pengerjaan		Rp96.050.000,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Rp6.653.133.463,45
	ASET LAINNYA		Rp220.870.000,00
	Aset Tak Berwujud		Rp39.270.000,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		Rp39.270.000,00
	Aset Lain-lain		Rp409.308.000,00
	Akumulasi Penyusutan aset lain-lain		Rp188.438.000,00
	BMD NON NERACA		Rp285.332.450,00
	BMD EKSTRAKOMTABLE		Rp285.332.450,00
	Total		Rp8.913.518.925,55

Kendaraan operasional Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 5 (lima) unit kendaraan dinas jabatan, 2 (dua) unit kendaraan operasional, 8 (delapan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang,

ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filing cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain, sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 3. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 80% dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 50% berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2023	27.214.136.631	2.695.821.500	-	-	29.909.958.131
2024	22.802.713.259	414.398.500	-	-	23.167.189.159

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2023 terdapat penurunan total anggaran belanja sebesar Rp6.742.768.972,00. Hal ini menunjukkan ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024*
4. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*
5. *Perjanjian Kinerja Tahun 2024*
6. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD*

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya tata kelola pemerintah. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah ‘Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah’.

Adapun sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%	%	<3%	<3%	<2%	<2%	<2%	<2%	
		Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas APIP	Nilai	n/a	3,00	3,01	3,02	3,03	3,03	
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektorat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung)	Nilai	n/a	78	79	79	79	79	

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	• Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, • Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, • Penataan peraturan perundang-undangan, • Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, • Tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen	

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.557.728.035	1.746.547.815	189.819.780
	1.2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	587.260.776	525.260.776	(62.000.000)
2.Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.382.865.908	20.895.380.568	(487.485.340)

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/04/ITDA/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

2.5.1 Perjanjian Kinerja 2024 (Induk)

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Inspektur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%	%	2	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	2
		Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas APIP	Level	3	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektorat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung)	Nilai	79	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	79

**Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja
Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%	• Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp1.557.728.035	
	Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas APIP	• Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp587.260.776	

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.382.865.908	

2.5.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Perubahan Kesatu)

Pada tahun 2024, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B274/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu *“ menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”*, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

**Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%	%	2	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	2
		Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas APIP	Level	3	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Triwulan	Target
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektorat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung)	Nilai	79	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	79

Tabel II.7 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Inspektor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5% Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas APIP	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp1.746.547.815 Rp525.260.776	
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.895.380.568	

Keterangan Tambahan:

1. tetapi anggaran berkurang 1,55% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi, yaitu Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah: Rp193.777.000,00

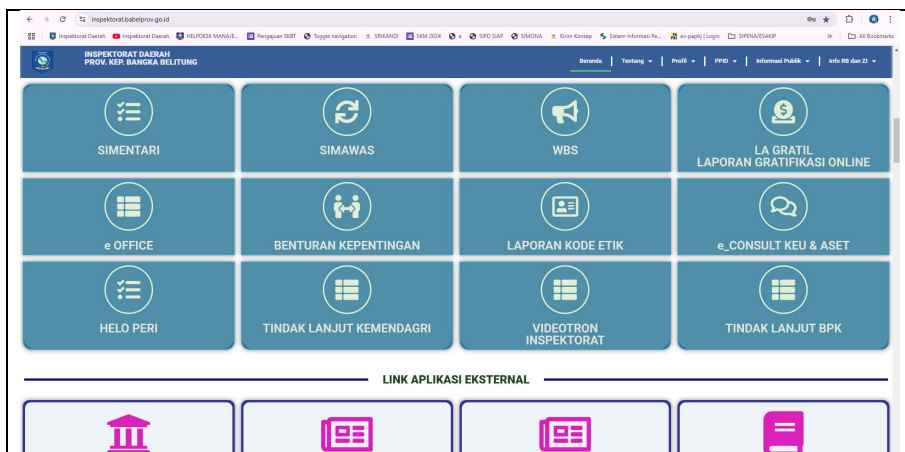
2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <https://inspektorat.babelprov.go.id/>.

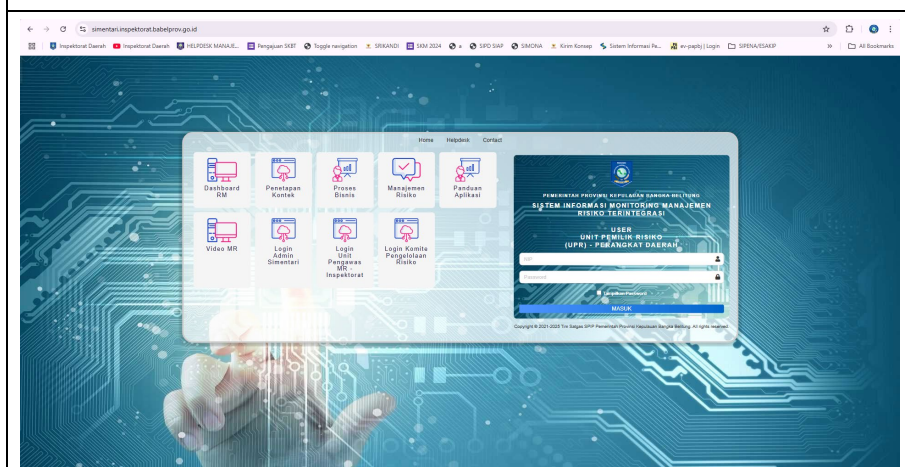
Di dalam laman *website* ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti SiMENTARI, SIMAWAS, WBS, LA GRATIL, e-OFFICE, dll.

**Gambar II.2. Website Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**





Aplikasi SIMENTARI



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

- *Capaian Kinerja Tahun 2024*
- *Efisiensi Anggaran*
- *Inovasi*
- *Penghargaan*
- *Lintas Sektor/Crosscutting*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<u>Indikator:</u> Nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan di bawah 5% <u>Formula</u> <u>Perhitungan:</u> perbandingan jumlah Total Anggaran APBD Tahun n dengan Total Jumlah Materialitas Temuan seluruh PD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pemeriksaan BPK dan APIP	%	<3%	0.09%	2%	0.11%	100%	Sgt baik	
		<u>Indikator:</u> Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP <u>Formula</u> <u>Perhitungan:</u> Skor penilaian oleh tim dari BPKP menggunakan instrumen penilaian yang terdiri dari indikator dan kriteria yang telah ditetapkan. Setiap komponen dinilai berdasarkan level dan menjadi skor/level kapabilitas dan maturitas	Nilai	n/a	3	3	3	100%	Sgt baik	
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektorat	<u>Indikator:</u> Hasil penilaian SAKIP Inspektorat Daerah <u>Formula</u> <u>Perhitungan:</u> Hasil penilaian nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	n/a	81,00	79	80,30	100%	Sgt baik	

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur dengan indikator Nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan di bawah 5% dan Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%	$\frac{\text{Total temuan materialitas PD}}{\text{Total APBD tahun } n} \times 100\%$
		Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Nilai hasil penilaian kapabilitas APIP dan hasil evaluasi maturitas SPIP

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur dengan menggunakan 2 (dua) formulasi perhitungan seperti yang tertera di atas. Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 100% dari target. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan di bawah 5%	2%	0,094%	100%	2%	0,111%	100%	2%	100%
	Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	100%

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- Tercapai dengan tingkat materialitas di bawah 2% dan Level Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP di Level 3, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100% (kolom 8) terlampaui.
- Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 0,094% (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengalami penurunan sebesar 18,08%.
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan sasaran program Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai Indikator Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan di bawah 5%. formula perhitungan indikator ini adalah

$$\frac{\text{Total temuan materialitas PD}}{\text{Total APBD tahun n}} \times 100\%.$$

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah

$$\frac{3,357,710,780.30}{3,007,550,621,052.00} \times 100\% = 0,111\% \text{ dari target } 2\% \text{ atau sebesar } 100\%.$$

Capaian ini didukung oleh :

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN.
- d. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- a. Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena administrasi penganggaran APBD-P yang agak terlambat mempengaruhi kepastian penjadwalan kegiatan sehingga mundur dari jadwal semula.
 - b. Kebijakan pengawasan menunggu keputusan pimpinan dan pusat.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan sasaran program Meningkatkan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP mempunyai Indikator Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP. Formula perhitungan indikator ini adalah Hasil *Quality Assurance* (QA) atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP dan Penilaian Maturitas SPIP pada PD yang menjadi sampel. Capaian indikator kinerja adalah Kapabilitas APIP di Level 3 dan Maturitas SPIP

di Level 3 dari target di Level 3. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yakni di Level 3. **Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti**

- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN.
- Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Beberapa program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena administrasi penganggaran APBD-P yang agak terlambat mempengaruhi kepastian penjadwalan kegiatan sehingga mundur dari jadwal semula.
- Perubahan kebijakan pada penilaian maturitas SPIP sehingga mempengaruhi beberapa aspek ketercapaian.

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5% $\frac{\text{Total temuan materialitas PD}}{\text{Total APBD tahun } n} \times 100\%$ $\frac{3,357,710,780.30}{3,007,550,621,052.00} \times 100\%$ $= 0,111\%$	5%	2%	*	0,111%	*	100%

- a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5% berada di bawah Target Nasional.
- b. Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5% berada dibawah Realisasi Nasional.
- c. Sebagai kesimpulan capaian indikator Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5% berada di atas capaian Nasional.

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5% melalui Program Program Penyelenggaraan Pengawasan.

- Program Penyelenggaraan Pengawasan melekat pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya, serta Bidang Pencegahan dan Investigasi, dengan kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran sebesar Rp1.664.208.775,00
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran sebesar Rp82.339.040,00

Tabel III.1
Program Penyelenggaraan Pengawasan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Kegiatan <i>expose</i> hasil pemeriksaan
2.		Kegiatan pemutakhiran hasil tindak lanjut pengawasan

3.1.1.2. Data Dukung Capaian Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi melekat pada Bidang Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya, serta Bidang Pencegahan dan Investigasi dengan kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan anggaran sebesar

Rp202.297.000,00;

- b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran sebesar Rp322.963.776,00.

Tabel III.2
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Kegiatan pendampingan MCP KPK
2.		Kegiatan pendampingan dan asistensi Maturitas SPIP

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan di bawah 5%	2%	0,13	100	1.746.547.815	1.516.066.849	86,80	Kolom 7 - 8
		Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	3	3	100	525.260.776	453.231.467	86,29	
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektorat	Hasil penilaian SAKIP Inspektorat Daerah	79	80,30	100	20.895.380.568	19.813.453.011	94,82	

Sumber: <http://SIPD>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Itda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2024, Laporan Keuangan Itda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2024 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar 100% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp1.384.437.832,00 yang bersumber dari:

- Efisiensi Belanja Operasi
- Efisiensi Belanja Modal
- Efisiensi Belanja Tak Terduga

3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/112/LHE/ITDA/2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Kepulauan Bangka Belitung TA. 2024 : Rekomendasi: Terhadap permasalahan yang telah diuraikan di atas kami merekomendasi kepada Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar kedepannya melakukan perbaikan terhadap LKIP supaya: 1. Data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan; 2. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang; 3. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) Tahun 2024 dengan langkah-langkah: 1. Data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan; 2. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang; 3. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional; 4. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;

	fungsional; 4. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja; 5. Laporan kinerja agar sepenuhnya: - Menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional, dan - Menjadi kepedulian seluruh pegawai; 6. Evaluasi akuntabilitas kinerja agar: - Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan; - Dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai; - Menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi); dan - Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal ditindaklanjuti untuk meningkatkan implementasi SAKIP.	5. Laporan kinerja agar sepenuhnya: - Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional telah diinformasikan; - Telah menjadi kepedulian seluruh pegawai. 6. Evaluasi akuntabilitas kinerja telah: - Ditetapkan dengan surat keputusan Inspektur; - Dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai; - Menggunakan teknologi informasi (aplikasi); dan - Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti untuk meningkatkan implementasi SAKIP
--	--	---

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

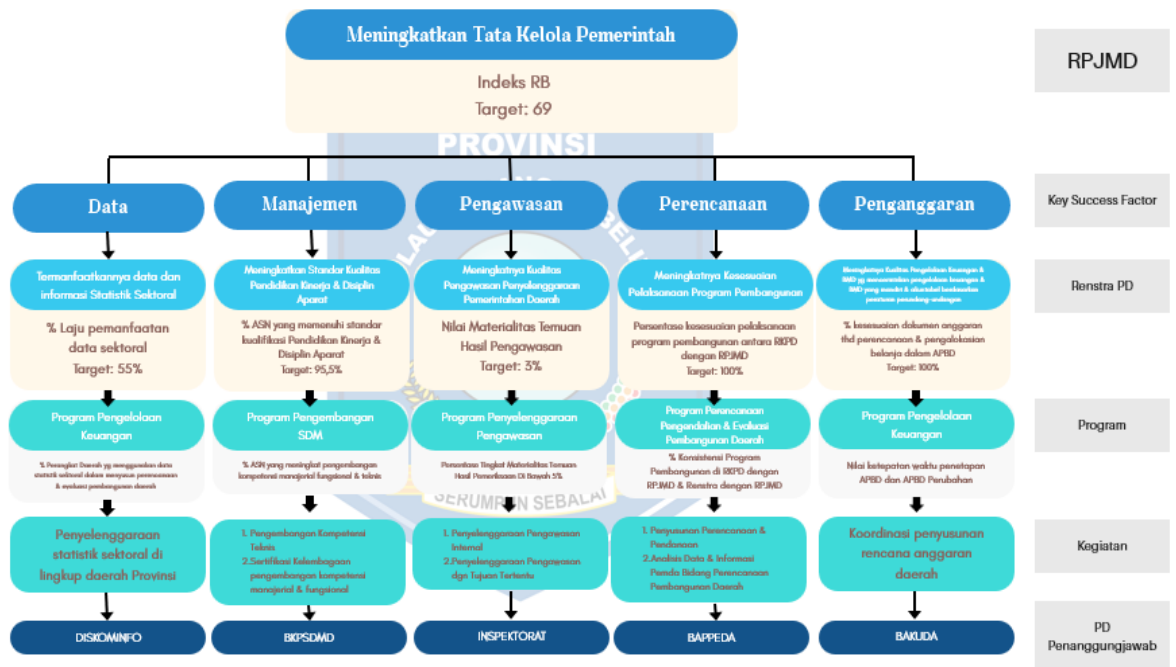
- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi SIMENTARI, yakni sistem informasi manajemen risiko yang sudah terintegrasi untuk penilaian risiko.
- c. Penyediaan *tools* pelaporan bagi masyarakat untuk pelaporan gratifikasi, pelaporan benturan kepentingan dan pelaporan pelanggaran kode etik.
- d. Penyediaan jasa konsultasi keuangan dan aset bagi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.5 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak berhasil mendapat penghargaan.

3.6 Crosscutting

Cross cutting adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana saja yang bekerjasama dengan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjanya



Bab 4 Berisi :

Kesimpulan

Rekomendasi

Rencana Aksi

BAB 4

Penutup

3.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, indikator kinerja Nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan di bawah 5%, Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dan Hasil penilaian SAKIP Inspektorat Daerah tercapai dengan presentase **100%**;
2. Keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari tersedianya data pengawasan dan perencanaan untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya anggaran terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik dengan instansi sosial kab/kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan serta partisipasi yang besar dari APIP serta seluruh OPD maupun lembaga terkait untuk mendukung program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan peran APIP dalam upaya penguatan tata pemerintahan. Disamping itu juga harus selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti lembaga BPKP Perwakilan, BPK Perwakilan, Aparat penegak hukum, OPD dan masyarakat terhadap peningkatan tata Kelola pemerintahan sehingga solusi pemecahan masalahnya bisa segera diatasi.
2. Pemerintah, LSM, swasta dan *stakeholders* harus lebih meningkatkan kerja sama dalam penyadaran hak-hak difabel melalui banyak media seperti, diskusi, *workshop*, media massa ataupun fasilitas *web*.
3. Penyedia layanan transportasi publik juga perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi yang aksesibel dan ramah difabel.
4. Memaksimalkan peran APIP dan instansi pemerintah serta melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan tata Kelola pemerintahan.
5. Memberikan penanaman nilai-nilai pengawasan.
6. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia APIP.

3.3 Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat.

- 
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
 3. Koordinasi dan komunikasi internal Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih intensif.
 4. Memperkuat peran APIP dalam mengoptimalkan perwujudan *good government* dan *clean governance*.
- 

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026**

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan di bawah 5%	N/a	3	2	2	2
				Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Capaian Maturitas SPIP	N/a	3,00	3,01	3,02	3,03
			Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektorat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/a	78	79	79	79

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pahlawan Belitong No. 1, Kecamatan Belitong, Kota Belitong, Kabupaten Bangka Belitung
Telp. (091) 751 2111, Faks. (091) 751 2112
E-mail: inspektord@bangka-belitong.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/04/JTDA/2024

TENTANG
PENTAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, sehingga keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara Nomor 6035;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan yang Bersifat Desentralisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44231);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

KETIDAK :

Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal : Januari 2024

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


PANTO

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 43 Seri E);

9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2028;

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2028 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

NO	SARAFAN	INDIKATOR KINERJA SARAFAN	TARJAH								Formulasi Perhitungan Kinerja	Definisi	Risiko Potensial	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Menyediakan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Maksimal Jumlah Hasil Penyelenggaraan Sarafan 5%	R/A	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	Jumlah hasil penyelenggaraan Sarafan yang terlaksana dari rencana tahun anggaran 2023-2030, persentase penilaian penyelenggaraan provinsi yang tercapai	Manajemen Outsource Kapasitas Belitong PR, Utan PR, Utan PR, Utan PR	Manajemen Outsource Kapasitas Belitong PR, Utan PR, Utan PR, Utan PR
2	Menyediakan Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektur	Nilai Capaian Kapasitas ADP & Mutuasi SPDP	R/A	3	3	3	3	3	3	3	3	Hasil penilaian Kapasitas ADP & SPDP	Manajemen Outsource Kapasitas Belitong PR, Utan PR, Utan PR, Utan PR	Manajemen Outsource Kapasitas Belitong PR, Utan PR, Utan PR, Utan PR

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


PANTO

Tekanan Elektronik: 188.4/04/JTDA/2024

1. Berikan Urutan Prioritas Penyelenggaraan Belitong

2. Berikan Urutan Prioritas Penyelenggaraan Belitong

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSANTO
Jabatan : PR. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SAFITZAL ZA, M.Si
Jabatan : PJ. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(Selaku atasan langsung pihak pertama)

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Safizal ZA, M.Si

PIHAK PERTAMA,
PR. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO
NIP. 19630612195031001

Bangkinang, Januari 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memngkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Mutualisitas Temuan Hasil Pemeriksaan Di Bawah 5% Nilai Hasil Kapabilitas APP dan Nilai Hasil Evaluasi Mutabilitas SPSP	2% Level 3	Total seluruh temuan aktual dari tahun yang bersifat materi (dibagi dengan total biaya APBD dikali 100)
2.	Memngkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektoral	Nilai SAKIP Peringkat Daerah (Inspektoral Daerah Prov. kep. Bangka Belitung)	79	Predikat (Nilai) SAKIP Inspektoral Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anggaran:

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Kot
1.	Nilai Mutualisitas Temuan Hasil Pemeriksaan Di Bawah 5%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.556.728.035,00	
2.	Nilai Hasil Kapabilitas APP dan Nilai Hasil Evaluasi Mutabilitas SPSP	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 587.260.776,00	
3.	Nilai SAKIP Peringkat Daerah (Inspektoral Daerah Prov. kep. Bangka Belitung)	Penunjang Usahan Daerah Pemertaha Provinsi	Rp21.382.865.969,00	

PIHAK KEDUA,
PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Safizal ZA, M.Si

PIHAK PERTAMA,
PR. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO
NIP. 19630612195031001

Bangkinang, Januari 2024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Delapan rangka merupakan gambaran pemertanian yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berdasar target di bawah ini :

Nama : YUNANI HELME

Jabatan : PT. INSPEKTUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Silangannya disebut PISAK PERTAMA

Nama : SUGITO

Jabatan : PT. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(Selaku atasan langsung pihak pertama)

Silangannya disebut PISAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang diharapkan yang yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterlaksanaan dan kagiatan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lampiran 1

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTORIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formulasi Pengembangan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Keterlaksanaan Tematik Hasil Pemeriksaan Di Bawah 5%	2%	Total nilai tematik eksternal tahun-an yang berdasar evaluasi diabaikan dengan total skor APSP di atas 100
		Nilai Hasil Kapabilitas APSP dan Nilai Hasil Evaluasi Mutuasi SP	Level 3	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Daerah
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektorial	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorial Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung)	79	Produk (NBS) SAKIP Inspektorial Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja (Kedua 3)	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai Keterlaksanaan Tematik Hasil Pemeriksaan Di Bawah 5%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.746.547.815,00	
2.	Nilai Hasil Kapabilitas APSP dan Nilai Hasil Evaluasi Mutuasi SP	Pendampingan, Kembangkan, dan Asistensi	Rp 525.260.776,00	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorial Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung)	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah	Rp20.895.380.560,00	

Pangkalpinang, November 2024

PIHAK KEDUA,
PT. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGITO

PIHAK PERTAMA,
PT. INSPEKTUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YUNANI HELME
Ambedi Gama Media
NIP 198470251990310009

Pangkalpinang, November 2024

PIHAK KEDUA,
PT. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGITO

PIHAK PERTAMA,
INSPEKTORIAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

YUNANI HELME
Wagdiya Gama Media
NIP 198470251990310009

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Sekeloa Timur No. 100, Sekeloa Timur, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung
 33111
 E-mail : inspektoriatdaerah@pb.go.id

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
INSPEKTORIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TREWILAN I TAHUN ANGGARAN 2024

BERTHA ACARA
 Nomor : BA- 01 /TDA/TW/2024

Padu hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 (terlampir).

Dengan Berta Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 dilaut dengan menggunakan dua kapal dipergunakan perahu nelayan selengkapannya.

Dilaut di Pangrehujung
 Pada tanggal 22 April 2024

PI. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YUNAN HELMI, M.S.
 Pembantu Utama Madya
 NIP. 196705031992031009

Padu hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 (terlampir).

Dengan Berta Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 dilaut dengan menggunakan dua kapal dipergunakan perahu nelayan selengkapannya.

Dilaut di Pangrehujung
 Pada tanggal 22 April 2024

PI. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YUNAN HELMI, M.S.
 Pembantu Utama Madya
 NIP. 196705031992031009

Padu hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 (terlampir).

Dengan Berta Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 dilaut dengan menggunakan dua kapal dipergunakan perahu nelayan selengkapannya.

Dilaut di Pangrehujung
 Pada tanggal 22 April 2024

PI. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YUNAN HELMI, M.S.
 Pembantu Utama Madya
 NIP. 196705031992031009

Padu hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 (terlampir).

Dengan Berta Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 dilaut dengan menggunakan dua kapal dipergunakan perahu nelayan selengkapannya.

Dilaut di Pangrehujung
 Pada tanggal 22 April 2024

PI. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YUNAN HELMI, M.S.
 Pembantu Utama Madya
 NIP. 196705031992031009

Padu hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 (terlampir).

Dengan Berta Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 dilaut dengan menggunakan dua kapal dipergunakan perahu nelayan selengkapannya.

Dilaut di Pangrehujung
 Pada tanggal 22 April 2024

PI. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YUNAN HELMI, M.S.
 Pembantu Utama Madya
 NIP. 196705031992031009

Padu hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 (terlampir).

Dengan Berta Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 dilaut dengan menggunakan dua kapal dipergunakan perahu nelayan selengkapannya.

Dilaut di Pangrehujung
 Pada tanggal 22 April 2024

PI. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YUNAN HELMI, M.S.
 Pembantu Utama Madya
 NIP. 196705031992031009

Padu hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 (terlampir).

Dengan Berta Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 dilaut dengan menggunakan dua kapal dipergunakan perahu nelayan selengkapannya.

Dilaut di Pangrehujung
 Pada tanggal 22 April 2024

PI. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YUNAN HELMI, M.S.
 Pembantu Utama Madya
 NIP. 196705031992031009

Padu hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 (terlampir).

Dengan Berta Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 dilaut dengan menggunakan dua kapal dipergunakan perahu nelayan selengkapannya.

Dilaut di Pangrehujung
 Pada tanggal 22 April 2024

PI. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YUNAN HELMI, M.S.
 Pembantu Utama Madya
 NIP. 196705031992031009

Padu hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 (terlampir).

Dengan Berta Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 dilaut dengan menggunakan dua kapal dipergunakan perahu nelayan selengkapannya.

Dilaut di Pangrehujung
 Pada tanggal 22 April 2024

PI. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YUNAN HELMI, M.S.
 Pembantu Utama Madya
 NIP. 196705031992031009

Padu hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 (terlampir).

Dengan Berta Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 dilaut dengan menggunakan dua kapal dipergunakan perahu nelayan selengkapannya.

Dilaut di Pangrehujung
 Pada tanggal 22 April 2024

PI. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YUNAN HELMI, M.S.
 Pembantu Utama Madya
 NIP. 196705031992031009

Padu hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 (terlampir).

Dengan Berta Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Trewilan I Tahun 2024 dilaut dengan menggunakan dua kapal dipergunakan perahu nelayan selengkapannya.

Dilaut di Pangrehujung
 Pada tanggal 22 April 2024

PI. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pahlawan Belitang, Kantor Inspektori Daerah, Kota Singkep, Kepulauan Bangka Belitung
 Kepulauan Bangka Belitung 33611
 Email: inspektorat@bangkabelitung.go.id / telp: 0911-751111

INSPEKTORAT DAERAH

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KIRJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIMULAH II TAHUN ANGGARAN 2024

BERTILAKAKAS

Nomor : BA- 02/ITDA/TWII/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pertemuan Laporan Monitor Rencana Aksi Trimester II Tahun 2024 (terlampir).

Ditunjuk Bertila Anna Yuliana Laporan Monitor Rencana Aksi Trimester II Tahun 2024 dibuat dengan sejujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana meeting.

INSPEKTORAT DAERAH

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KIRJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIMULAH II TAHUN ANGGARAN 2024

Ditandatangani di
 Tanggal 10 Juli 2024

INSPEKTOR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BERTILA ANNA YULIANA M.Si.
 NIP. 198703031990311009

NO	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	SATUAN	TARUHAN TAHUN 2024	TRIMESTER II			PENCAPAIAN PROGRAM TAHUNAN	Pencapaian Tahun (Rata-rata)
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
1	2	3							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai materialitas layanan hasil pemantauan diarah 5%	%	2%	-	n/a	-	Realisasi peningkatan materialitas diarah 5%	
		Nilai hasil Kefektifitas APD dan Nilai Hasil Diskusi Masyarakat BPP	Nilai	Level 3	-	n/a	-	Pelaksanaan forum diskusikan hasil pemantauan hasil pemantauan baru bisa diarah 5% di Trimester IV	
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan pelayanan administrasi (Sisa Pro- Baku)	Nilai KAPKIP	Nilai	79	-	n/a	-	Indeks target di Trimester I	

INSPEKTOR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BERTILA ANNA YULIANA M.Si.
 NIP. 198703031990311009

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Pahlawan Indonesia No. 1, Gedung Kantor Gubernur, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Kode Pos: 36101, Nomor Telepon: 091-7551100, Fax: 091-7551101
 E-mail: inspekturdaerah@bangkalit.go.id

Halaman: 1 dari 1

BERITA AKBAR

Nomor : BA. 02/ITTA/TW/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Rencana dan Triwulan II Tahun 2024 (terlampir).

Ditulis Berita Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024 ditulis dengan menggunakan data dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalpinang
 Pada tanggal 05 November 2024

PI. INSPEKTUR
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

P. HELMI M.Si
 Sekretaris Utama Medhya
 NIP. 19670041992011009

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI SINERGI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TARGET KINERJA TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	TRIWULAN II		PERALOKANSI JAWAB (RUBIK)
							PERSENTASE CAPAIAN	PERSENTASE PROGRES TRIW II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nila materialisasi program hasil pemenuhan di bawah 3%	%	2%	-	n/a	0%	Belum terdapat pengurangan materialisasi di bawah 3% di Triwulan II (Program Penyelenggaraan Pemerintahan)	57,86%
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nila hasil Realisasi angket dan Nila hasil Evaluasi Mutasi Diri Inspektorial	Nila	Level 3	-	n/a	0%	Pelayanan belum dilaksanakan hasil penilaian baru bisa di bawah 3% di Triwulan IV	53,62%
3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Nila IKMPP Pengaduan Masyarakat (Sisa Per Salaku)	Nila	79	-	n/a	100%	Salah terdapat di Triwulan I (Pengawasan Pengawasan Urusan Administrasi Daerah Provinsi)	63,26%

PI. INSPEKTUR
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

P. HELMI M.Si
 Sekretaris Utama Medhya
 NIP. 19670041992011009

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 4 Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pahlawan Bangsa II Komplek Perkotaan, Kecamatan Pangkalpinang Kota, Kabupaten Pangkalpinang 31144
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BERITA ACARA

Nomor : BA-04/ITDA/TWII/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024 (terlampir).

Demikian Berita Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024 dibuat dengan seangghnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 31 Desember 2024

PI. INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. YUNAN HELMI, M.Si.

Pembina Utama Madhya

NIP. 196705051990301009

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	TARJHET TRIMESTER	TARJHET BULAN TW II	REALISASI BULAN TW II	PERSENTASE CAPAIAN (%)	PENYELATAN PROGRES TW II	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW II	PERANGKAP JAWAB (BIDANG)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan 90%	Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan 90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	90%
2	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat 90%	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat 90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	90%

PI. INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. YUNAN HELMI, M.Si.

Pembina Utama Madhya

NIP. 196705051990301009

Lampiran 5. Dokumen LHE Akuntabilitas Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pahlawan Bangsa II Komplek Perkotaan, Kecamatan Pangkalpinang Kota, Kabupaten Pangkalpinang 31144
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang, 14 April 2024

Nomor : 700/111/144/ITDA/2024

1. Kepala Inspektoriat Daerah

2. Kepala Inspektoriat

3. Kepala Inspektoriat

4. Kepala Inspektoriat

5. Kepala Inspektoriat

6. Kepala Inspektoriat

7. Kepala Inspektoriat

8. Kepala Inspektoriat

9. Kepala Inspektoriat

10. Kepala Inspektoriat

11. Kepala Inspektoriat

12. Kepala Inspektoriat

13. Kepala Inspektoriat

14. Kepala Inspektoriat

15. Kepala Inspektoriat

16. Kepala Inspektoriat

17. Kepala Inspektoriat

18. Kepala Inspektoriat

19. Kepala Inspektoriat

20. Kepala Inspektoriat

21. Kepala Inspektoriat

22. Kepala Inspektoriat

23. Kepala Inspektoriat

24. Kepala Inspektoriat

25. Kepala Inspektoriat

26. Kepala Inspektoriat

27. Kepala Inspektoriat

28. Kepala Inspektoriat

29. Kepala Inspektoriat

30. Kepala Inspektoriat

31. Kepala Inspektoriat

32. Kepala Inspektoriat

33. Kepala Inspektoriat

34. Kepala Inspektoriat

35. Kepala Inspektoriat

36. Kepala Inspektoriat

37. Kepala Inspektoriat

38. Kepala Inspektoriat

39. Kepala Inspektoriat

40. Kepala Inspektoriat

41. Kepala Inspektoriat

42. Kepala Inspektoriat

43. Kepala Inspektoriat

44. Kepala Inspektoriat

45. Kepala Inspektoriat

46. Kepala Inspektoriat

47. Kepala Inspektoriat

48. Kepala Inspektoriat

49. Kepala Inspektoriat

50. Kepala Inspektoriat

51. Kepala Inspektoriat

52. Kepala Inspektoriat

53. Kepala Inspektoriat

54. Kepala Inspektoriat

55. Kepala Inspektoriat

56. Kepala Inspektoriat

57. Kepala Inspektoriat

58. Kepala Inspektoriat

59. Kepala Inspektoriat

60. Kepala Inspektoriat

61. Kepala Inspektoriat

62. Kepala Inspektoriat

63. Kepala Inspektoriat

64. Kepala Inspektoriat

65. Kepala Inspektoriat

66. Kepala Inspektoriat

67. Kepala Inspektoriat

68. Kepala Inspektoriat

69. Kepala Inspektoriat

70. Kepala Inspektoriat

71. Kepala Inspektoriat

72. Kepala Inspektoriat

73. Kepala Inspektoriat

74. Kepala Inspektoriat

75. Kepala Inspektoriat

76. Kepala Inspektoriat

77. Kepala Inspektoriat

78. Kepala Inspektoriat

79. Kepala Inspektoriat

80. Kepala Inspektoriat

81. Kepala Inspektoriat

82. Kepala Inspektoriat

83. Kepala Inspektoriat

84. Kepala Inspektoriat

85. Kepala Inspektoriat

86. Kepala Inspektoriat

87. Kepala Inspektoriat

88. Kepala Inspektoriat

89. Kepala Inspektoriat

90. Kepala Inspektoriat

91. Kepala Inspektoriat

92. Kepala Inspektoriat

93. Kepala Inspektoriat

94. Kepala Inspektoriat

95. Kepala Inspektoriat

96. Kepala Inspektoriat

97. Kepala Inspektoriat

98. Kepala Inspektoriat

99. Kepala Inspektoriat

100. Kepala Inspektoriat

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PI. INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. YUNAN HELMI, M.Si.

Pembina Utama Madhya

NIP. 196705051990301009

Tembusan:

1) Kantor PAN dan RB;

2) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

1. Kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dengan tujuan:

2. Ruang lingkup evaluasi:

3. Ruang lingkup evaluasi:

4. Ruang lingkup evaluasi:

5. Ruang lingkup evaluasi:

6. Ruang lingkup evaluasi:

7. Ruang lingkup evaluasi:

8. Ruang lingkup evaluasi:

9. Ruang lingkup evaluasi:

10. Ruang lingkup evaluasi:

11. Ruang lingkup evaluasi:

12. Ruang lingkup evaluasi:

13. Ruang lingkup evaluasi:

14. Ruang lingkup evaluasi:

15. Ruang lingkup evaluasi:

16. Ruang lingkup evaluasi:

17. Ruang lingkup evaluasi:

18. Ruang lingkup evaluasi:

19. Ruang lingkup evaluasi:

20. Ruang lingkup evaluasi:

21. Ruang lingkup evaluasi:

22. Ruang lingkup evaluasi:

23. Ruang lingkup evaluasi:

24. Ruang lingkup evaluasi:

25. Ruang lingkup evaluasi:

26. Ruang lingkup evaluasi:

27. Ruang lingkup evaluasi:

28. Ruang lingkup evaluasi:

29. Ruang lingkup evaluasi:

30. Ruang lingkup evaluasi:

31. Ruang lingkup evaluasi:

32. Ruang lingkup evaluasi:

33. Ruang lingkup evaluasi:

34. Ruang lingkup evaluasi:

35. Ruang lingkup evaluasi:

36. Ruang lingkup evaluasi:

37. Ruang lingkup evaluasi:

38. Ruang lingkup evaluasi:

39. Ruang lingkup evaluasi:

40. Ruang lingkup evaluasi:

41. Ruang lingkup evaluasi:

42. Ruang lingkup evaluasi:

43. Ruang lingkup evaluasi:

44. Ruang lingkup evaluasi:

45. Ruang lingkup evaluasi:

46. Ruang lingkup evaluasi:

47. Ruang lingkup evaluasi:

48. Ruang lingkup evaluasi:

49. Ruang lingkup evaluasi:

50. Ruang lingkup evaluasi:

51. Ruang lingkup evaluasi:

52. Ruang lingkup evaluasi:

53. Ruang lingkup evaluasi:

54. Ruang lingkup evaluasi:

55. Ruang lingkup evaluasi:

56. Ruang lingkup evaluasi:

57. Ruang lingkup evaluasi:

58. Ruang lingkup evaluasi:

59. Ruang lingkup evaluasi:

60. Ruang lingkup evaluasi:

61. Ruang lingkup evaluasi:

62. Ruang lingkup evaluasi:

63. Ruang lingkup evaluasi:

64. Ruang lingkup evaluasi:

65. Ruang lingkup evaluasi:

66. Ruang lingkup evaluasi:

67. Ruang lingkup evaluasi:

68. Ruang lingkup evaluasi:

69. Ruang lingkup evaluasi:

70. Ruang lingkup evaluasi:

71. Ruang lingkup evaluasi:

72. Ruang lingkup evaluasi:

73. Ruang lingkup evaluasi:

74. Ruang lingkup evaluasi:

75. Ruang lingkup evaluasi:

76. Ruang lingkup evaluasi:

77. Ruang lingkup evaluasi:

78. Ruang lingkup evaluasi:

79. Ruang lingkup evaluasi:

80. Ruang lingkup evaluasi:

81. Ruang lingkup evaluasi:

82. Ruang lingkup evaluasi:

83. Ruang lingkup evaluasi:

84. Ruang lingkup evaluasi:

85. Ruang lingkup evaluasi:

86. Ruang lingkup evaluasi:

87. Ruang lingkup evaluasi:

88. Ruang lingkup evaluasi:

89. Ruang lingkup evaluasi:

90. Ruang lingkup evaluasi:

91. Ruang lingkup evaluasi:

92. Ruang lingkup evaluasi:

93. Ruang lingkup evaluasi:

94. Ruang lingkup evaluasi:

95. Ruang lingkup evaluasi:

96. Ruang lingkup evaluasi:

97. Ruang lingkup evaluasi:

98. Ruang lingkup evaluasi:

99. Ruang lingkup evaluasi:

100. Ruang lingkup evaluasi:

Diagram Siklus ELAKIP (Evaluasi Kinerja)

Perencanaan Kinerja

- 1. Penetapan Tujuan/Sasaran
- 2. Hubungan Program/Kegiatan dengan Tujuan/Sasaran
- 3. Indikator Kinerja
- 4. Target Kinerja

Pengukuran Kinerja

- 1. Penyediaan Anggaran Sesuai Target Kinerja
- 2. Standar Biaya untuk Output
- 1. Pengumpulan Data Kinerja
- 2. Pengukuran Data Kinerja

Pelaporan Kinerja

- 1. Capaian Kinerja
- 2. Akuntabilitas Kinerja VS Akuntabilitas Keuangan

Evaluasi Kinerja

- 1. Penilaian Kinerja
- 2. Perbaikan Kinerja
- 3. Perbaikan Perencanaan
- 4. Redistribusi Anggaran

ELAKIP

PERMINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Pahlawan Belitong Nomor 1, Kecamatan Pangkalpinang, Kabupaten Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Bukit Liris, Pangkalpinang 33329
E-mail: inspektordae@pbb.go.id

Nomor : 700/0- ITDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tidak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

Yth. Sekretaris Inspektoriat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

d - Pengkalpinang

Selubungan dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/112/HE/ITDA/2024 Tanggal 04 April 2024, diketahui bahwa terdapat rekomendasi dari tim evaluasi agar kedepannya melakukan perbaikan dalam penyusunan LAKIP.

Merujuk dari hal tersebut, dengan ini menginstruksikan Saudara agar:

1. Data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
2. Setiap level organisasi melakukan pembiasaan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
3. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja dan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
4. Laporan kinerja agar sebagaimana:
 - a. Menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional, dan
 - b. Menjadi kepedulian seluruh pegawai;
5. Evaluasi akuntabilitas kinerja agar:
 - a. Diintegrasikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan;
 - b. Dilaksanakan dengan pendanaan yang memadai;
 - c. Menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi); dan

d. Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti untuk meningkatkan implementasi SAKIP.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Pt. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

INAM KUSNADI, S.E., M.A.B., CfrA, CRGP, CGCAE
Pembina Tk.I
NIP. 197506092008121001

